

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

Kilun Henerty dan M.Titan Terzaghi SE.Ak.M.Si

Fakultas ekonomi dan bisnis, program studi akuntansi, Universitas Bina Darma

[Killunhenerty97@yahoo.com](mailto:Killunhenerty97@yahoo.com)

[Itan00771@gmail.com](mailto:Itan00771@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the factors that influence economic growth in the provincial government in Indonesia for the period of 2016 and 2017. The data used in this study are secondary data. a total population of 34 and only 33 provinces were sampled in the study. The data analysis test used is multiple linear and hypothesis development including determinant coefficient (R), simultaneous test (F) and partial (T). This research uses independent variables; local own revenue (PAD), general allocation fund (DAU), profit sharing fund (DBH), special allocation fund (DAK), capital balance (BM), human development index (HDI) and the dependent variable; Economic growth (PE). The results showed that only PAD and DBH had a positive influence on economic growth, while DAU, DAK, BM and IPM had no effect on economic growth.*

*Keywords: Economic growth, PAD, DAU, DBH, DAK, BM dan IPM.*

### **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu sistem dari kegiatan ekonomi yang mengalami perubahan kearah yang lebih baik dari waktu ke waktu sehingga barang dan jasa yang diproduksi akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan memberikan informasi mengenai sampai sejauh mana pencapaian yang telah diperoleh dari aktivitas perekonomian. hal ini membuat Pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam proses pertumbuhan baik negara maupun daerah.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang telah mencapai target ataupun pencapaian dari tujuan pembangunan daerahnya, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tidak terlepas dari keberhasilan dalam merealisasikan pendapatan dan pengeluaran daerah baik yang bersumber dari daerah itu sendiri maupun dari dana transfer pemerintah pusat melalui APBN secara efektif dan efisien. pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan ke daerah guna untuk mengatasi ketimpangan serta ketidak merataan keuangan antar daerah yang ada di Indonesia.

Indonesia yang sampai saat ini memiliki 34 provinsi yang berlatar belakang dan sumber pendapatan daerah berbeda-beda tentu akan menimbulkan kecemburuan antara daerah satu dengan daerah lainya. Perekonomian Indonesia di tahun 2016 berdasarkan PDRB yang menjadi proksi pertumbuhan ekonomi dan atas dasar harga berlaku senilai Rp 12.406,8 triliun dengan persentase pertumbuhan 5,02%. tahun 2017 mengalami peningkatan Rp 13.588,8 dengan persentase 5,07% lebih tinggi dari pencapaian pada tahun 2016. Struktur ekonomi secara keseluruhan tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan tertinggi dipegang oleh prov DKI Jakarta yang mengalami pertumbuhan tertinggi 17,19 sampai 17,43% sedangkan provinsi Aceh mengalami penurunan dari 1,08% ke angka 1,06%.

Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tercapai apabila pemerintah mampu mengelola Sumber-sumber daya yang ada dengan semestinya sesuai dengan anggaran dan agenda pemerintahan, sehingga variabel bebas pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rahmah dan Zein (2016), dalam penelitian tersebut terdapat tiga variabel bebas yaitu PAD,DAU, dan DBH dan peneliti menambahkan tiga variabel DAK, BM,dan IPM. Seluruh provinsi yang ada di Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena dilihat dari sisi geografis indonesia yang memiliki 34 provinsi dimana tiap-tiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda, sehingga terjadi ketidak merataan dan ketimpangan antar daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk menanggulangi hal tersebut yaitu dengan melakukan transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas dalam penulisan ini, penulis tertarik untuk mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA “.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pertumbuhan Ekonomi

Secara publik definisi dari pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perkembangan dan kemajuan kegiatan dalam perekonomian sehingga barang dan jasa yang diproduksi akan bertambah dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menginformasikan sampai sejauh mana perkembangan aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. pertumbuhan ekonomi daerah diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB atas dasar harga berlaku menjabarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Rumus indikator PDRB sebagai berikut;

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

### Pendapatan Asli Daerah

Rahmah dan Zein (2016), PAD merupakan penerimaan daerah yang murni dan bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang sah. PAD akan digunakan sebagai modal awal pemerintah daerah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur maupun sarana prasarana daerah agar mengurangi tingkat ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar pendapatan asli daerah, maka ketergantungan daerah terhadap pusat akan semakin berkurang. Indikator untuk menghitung PAD berikut:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

### Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan (DAU) ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana pelayanan publik yang ada pada setiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata. Kisaran dana yang dialokasikan untuk DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) *netto* yang ditetapkan dalam APBN. Rumus menghitung DAU sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

### Dana Bagi Hasil

Saleh (2017), Dana Bagi Hasil adalah pendanaan yang dipeloeh pemerintah daerah dari hasil pengelolaan sumber daya yang menjadi penerimaan resmi negara yang akhirnya akan dilakukan transfer dana untuk masing-masing daerah penghasil sumber daya (*by origin*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. semakin besar pendapatan yang dihasilkan suatu daerah maka DBH yang didapat juga besar yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan serta pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (SDM).

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH Bukan Pajak}$$

## Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas kebutuhan nasional dengan tetap memperhatikan nilai ketersediaan dana APBN. Dana alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah akan diarahkan pada produksi pembangunan, pengadaan, peningkatan, serta perbaikan sarana prasarana fisik dengan periode ekonomis. Berikut rumus untuk mencari DAK:

$$\text{DAK} = \text{DAK} + \text{DAK Tambahan}$$

## Belanja Modal

Nopiani (2016), Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang pada hakikatnya akan menambah aset maupun kekayaan daerah seperti peralatan, infrastruktur, serta harta tetap lainnya dengan massa manfaat melebihi satu tahun anggaran. Belanja modal didapatkan dengan cara membeli melalui proses tender atau lelang serta melingkupi jenis belanja baik untuk belanja aparatur daerah maupun belanja pelayanan publik. Semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.

BM = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

## Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM), merupakan suatu indek yang pendekatannya untuk mengukur tingkat keberhasilan manusia yang didalamnya terkandung aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Todaro (2011), dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya investasi modal manusia. Investasi modal manusia yang dimaksudkan adalah investasi pendidikan dan kesehatan karena jika seseorang manusia dinyatakan sehat dan berpendidikan maka diharapkan mampu untuk mengelola dan menangkap potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah sehingga akan memperoleh pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Indeks Pembangunan manusia di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \frac{1}{3} [\text{X}(1) + \text{X}(2) + \text{X}(3)]$$

## Kerangka Pemikiran

Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Besarnya pendapatan asli suatu daerah, maka akan meminimalkan nilai ketergantungan finansial daerah terhadap pusat. selain itu pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan anggaran secara leluasa tanpa adanya tekanan ataupun perintah dari pemerintah pusat. PAD sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan diikuti keajahteraan pada masyarakat setempat. Dwirandra dan Candra (2014), dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk melakukan pembangunan sarana prasarana guna memfasilitasi pelayanan *public* baik bagi masyarakat lokal maupun nasional dan keberadaan dari infrastruktur tersebut akan menjadi indikator pertumbuhan seiring dengan meningkatnya tingkat produktivitas.

#### Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonom

Berasaskan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, DAU adalah dana transfer pemerintah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah di Indonesia untuk mendanai keperluan dan kebutuhan daerah dalam rangka penerapan desentralisasi. Dana perimbangan DAU merupakan konsekuensi dari pelimpahan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga terjadi pengalokasian dana yang cukup signifikan dalam APBN pusat untuk daerah. Pemerintah Pusat mengeluarkan dana perimbangan berupa dana alokasi umum untuk mengatasi ketimpangan yang ada pada setiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata.

#### Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan ekonomi

Menurut Rahma dan Zein (2016), Dana Bagi Hasil merupakan pendanaan yang dipeloeh pemerintah daerah dari hasil pengelolaan sumber daya yang menjadi penerimaan resmi negara yang selanjutnya akan ditrasfer ke masing-masing daerah penghasil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. DBH terdiri dari pajak dan sumber daya alam. semakin besar pendapatan yang dihasilkan suatu daerah maka DBH yang didapat juga besar yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan serta pembangunan daerah, sehinga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

#### Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan untuk pendanaan kebutuhan khusus daerah sesuai dengan kebutuhan nasional dengan tetap mempertibangkan nilai ketersediaan dana APBN. DAK yang diterima oleh pemerintah daerah akan ditujukan ke kegiatan pengembangan, penyediaan, peningkatan, dan pembetulan sarana dan prasarana fisik dalam umur ekonomi lebih dari satu perode akuntansi. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat membantu finansial daerah dalam menjalankan proses pertumbuhan ekonomi. Sebab dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

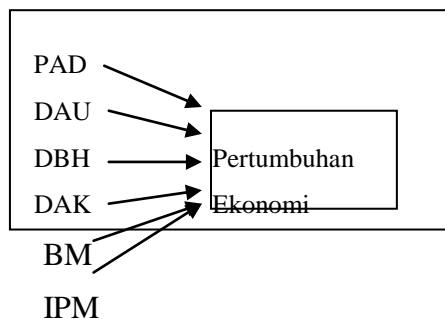
#### Hubungan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berasaskan pada PP No 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang pada hakikatnya akan menambah aset maupun kekayaan daerah seperti peralatan, infrastruktur, serta harta tetap lainnya dengan masa manfaat melebihi satu tahun anggaran. yang selanjutnya akan diikuti dengan penambahan belanja yang bersifat rutin misalnya biaya pemeliharaan, dan biaya operasional pada kelompok belanja administrasi umum. Semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut (BPS, 2015).

#### Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia. Manusia yang berkualitas keterampilan, pengetahuan dan kompeten di bidangnya merupakan modal utama yang dibutuhkan oleh suatu wilayah dalam menjalankan proses pertumbuhan ekonomi. Antara IPM dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat karena dengan meningkatnya IPM akan mendorong pembangunan baik dalam infrastruktur, sarana prasarana maupun dalam sektor industri untuk berproduksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### Kerangka Pemikiran



#### Hipotesis

H<sub>1</sub> = Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi

H<sub>2</sub> = Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan ekonomi

H<sub>3</sub> = Pengaruh DBH terhadap Pertumbuhan ekonomi

H<sub>4</sub> = Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan

ekonomi

H<sub>5</sub> = Pengaruh BM terhadap Pertumbuhan

ekonomi

H<sub>6</sub> = Pengaruh IPM terhadap Pertumbuhan ekonomi

### Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh faktor-faktor (PAD, DAU, DBH, DAK, BM, dan IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian menggunakan analisis linear berganda (multiple linear regression). Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan pengujian koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### Hasil dan Pembahasan

#### Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia pada periode 2016 dan 2017. Jenis data berupa data sekunder diantaranya laporan realisasi anggaran, Indeks pembangunan manusia, dan PDRB yang diakses melalui *website* resmi badan pusat statistik (BPS). Penarikan sampel penelitian menggunakan metode *purposive Sampling*. *Sample* dalam penelitian berjumlah 33 provinsi di Indonesia periode 2016 dan 2017.

#### Uji Statistik Deskriptif

Ghozali (2011), Uji ini berguna untuk memberikan deskriptif suatu data diukur dengan nilai mean, maksimum, minimum, serta stan.dev. Tabel uji 4.9 menunjukkan

Deskriptif Statistik

I	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	66	19,44	21,62	21,2211	1,07799
DAU	66	18,20	22,06	20,9798	,50227
DBH	66	17,06	22,75	19,8265	1,28073
DAK	66	17,15	22,93	20,1574	1,37985
BM	66	19,06	23,94	20,6488	,75629
IPM	66	58,05	78,89	69,1414	1,72143
PE	66	,23	14,61	2,4435	3,40140
Valid N (listwise)	66				

#### Pengujian Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DBH, DAK, BM dan IPM terhadap PE baik secara simultan maupun parsial.

$$PE = - 59,597 + 2,077 PAD + 0,666 DAU + 0,631$$

DBH + 0,423 DAK - 0,493M - 0,009 IPM + e

Koefisien Determinasi

Hasil dari uji model regresi diperoleh nilai koefisien ( $R^2$ ) sebagai berikut;

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,854 <sup>a</sup>	,729	,701	1,86023

Hasil diatas menunjukkan hasil 0,701 yang artinya 70,1% variasi variabel *dependent* (Pertumbuhan Ekonomi) dapat dijelaskan oleh variabel bebas PAD,DAU,DBH,DAK,BM dan IPM, sedangkan sisanya 29,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan kata lain hubungan antar variabel kuat.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Uji F atau simultan digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas (*independent*) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependent*). Berikut hasil uji F;

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	547,851	6	91,309	26,386	,000 <sup>b</sup>
	Residual	204,166	59	3,460		
	Total	752,017	65			

Tabel uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 26,386 dengan signisikan senilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti PAD, DAU, DBH, DAK, BM dan IPM berpengaruh secara simultan terhadap PE sebagai variabel devendennya.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Analisis Uji t atau parsial diperlukan untuk mengetahui apakah masing-masing dari keenam variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat.

Tabel Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-59,597	34,471		-4,118	,000
PAD	2,077	,525	,638	3,959	,000
DAU	,666	,539	,098	1,236	,221
DBH	,631	,361	,238	2,099	,040
DAK	,423	,296	,159	1,429	,158
BM	-,493	,432	-,110	-1,141	,258
IPM	-,099	,083	-,109	-1,126	,265

Nilai  $t_{hitung}$  PAD senilai 3,959 dan nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikans 1 arah 0,05 dengan  $df = n - k$  atau  $df = 66 - 7 = 59$  adalah 1,67109. Nilai Sig. Penelitian adalah 0,000 dan nilai  $\alpha = 0,05$ . Jadi nilai  $t_{hitung} >$  nilai  $t_{tabel}$  ( $3,959 > 1,67109$ ) dan nilai Sig. Penelitian  $<$  nilai  $\alpha$  ( $0,000 < 0,005$ ).



Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi atau  $H_1$  diterima.

Nilai  $t_{hitung}$  DDU senilai 1,236 dan nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 1 arah 0,05 dengan  $df = n - k$  atau  $df = 66 - 7 = 59$  adalah 1,67109. Nilai Sig. Penelitian adalah 0,221 dan nilai  $\alpha = 0,05$ . Jadi nilai  $t_{hitung} <$  nilai  $t_{tabel}$  ( $1,236 < 1,67109$ ) dan nilai Sig. Penelitian  $>$  nilai  $\alpha$  ( $0,221 > 0,005$ ). Artinya DDU bersifat tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016 dan 2017 atau  $H_2$  ditolak.

Nilai  $t_{hitung}$  DBH senilai 2,099 dan nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 1 arah 0,05 dengan  $df = n - k$  atau  $df = 66 - 7 = 59$  adalah 1,67109. Nilai Sig. Penelitian adalah 0,040 dan nilai  $\alpha = 0,05$ . Jadi nilai  $t_{hitung} >$  nilai  $t_{tabel}$  ( $2,099 > 1,67109$ ) dan nilai Sig. Penelitian  $<$  nilai  $\alpha$  ( $0,040 < 0,005$ ). Artinya terdapat pengaruh positif DBH terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016 dan 2017 atau  $H_3$  diterima.

Nilai  $t_{hitung}$  BM senilai -1,141 dan nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 1 arah 0,05 dengan  $df = n - k$  atau  $df = 66 - 7 = 59$  adalah 1,67109. Nilai Sig. Penelitian adalah 0,158 dan nilai  $\alpha = 0,05$ . Jadi nilai  $t_{hitung} <$  nilai  $t_{tabel}$  ( $-1,141 < 1,67109$ ) dan nilai Sig. Penelitian  $>$  nilai  $\alpha$  ( $0,258 > 0,005$ ). Artinya tidak terdapat pengaruh BM terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016 dan 2017 atau  $H_5$  ditolak.

Nilai  $t_{hitung}$  IPM senilai -1,126 dan nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 1 arah 0,05 dengan  $df = n - k$  atau  $df = 66 - 7 = 59$  adalah 1,67109. Nilai Sig. Penelitian adalah 0,158 dan nilai  $\alpha = 0,05$ . Jadi nilai  $t_{hitung} <$  nilai  $t_{tabel}$  ( $-1,126 < 1,67109$ ) dan nilai Sig. Penelitian  $>$  nilai  $\alpha$  ( $0,265 > 0,005$ ). Artinya tidak terdapat pengaruh BM terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016 dan 2017 atau  $H_6$  ditolak.

## Pembahasan

### Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai  $t_{hitung} >$  nilai  $t_{tabel}$  ( $3,959 > 1,67109$ ) dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menjelaskan apabila daerah dengan PAD yang tinggi maka akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal ini karena dalam suatu proses pembangunan ekonomi PAD merupakan pendanaan dasar yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah.

Selain itu hasil ini juga konsisten dengan hasil penelitian Rahma dan Zein (2016), di kabupaten/kota provinsi Aceh. yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Suputra (2017), yang menyatakan bahwa PAD negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi diterima.

### Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,236 < 1,67109$ ) dan nilai signifikan ( $0,221 > 0,05$ ). Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Oktafia dkk (2018), Serta Rahma dan Zein (2016), yang menyatakan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Suputra (2017), yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alasan DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena DAU merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang pemberinya bersifat *block grant* sesuai dengan kebutuhan nasional daerah dan penggunaan dana DAU ini cenderung akan digunakan pemerintah daerah untuk pembiayaan rutin seperti pembayaran gaji pegawai negeri sipil, perangkat pemerintah, honorer dan sebagainya. sehingga tidak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pembiayaan untuk pembangunan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari analisis menolak DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari pengujian memperlihatkan hasil nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,099 > 1,67109$ ) dan nilai signifikan ( $0,040 < 0,05$ ). Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian nopiani dkk (2016), dan Rahma dan Zein (2016) yang berpendapat bahwa DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Saleh (2017), di kabupaten/ kota provinsi Jawa Tengah yang menyatakan DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Bagi Hasil adalah pendanaan yang dipeloeh pemerintah daerah dari hasil pengelolaan sumber daya yang menjadi penerimaan resmi negara yang akhirnya akan dilakukan transfer dana untuk masing-masing daerah penghasil sumber daya. Semakin besar dana yang dikontribusikan daerah ke pusat maka akan semakin besar pula penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah sehingga dapat dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari tabel 4.16 menunjukkan bahwa semakin tinggi DBH yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin tinggi peluang pemerintah untuk memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal ini karena sifat DBH hampir sama seperti PAD. Dengan demikian hipotesis ketiga DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi diterima.

#### Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian menunjukkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,429 < 1,67109$ ) dan nilai signifikan ( $0,158 > 0,05$ ). Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Oktafia dkk (2018), yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian ini DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

hasil dari uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan karena DAK bersifat *special grant* yang berarti penggunaannya ditentukan pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan yang merupakan bagian dari penentu pertumbuhan ekonomi. Selain itu DAK cenderung dipergunakan untuk

perbaikan infrastruktur, sarana prasarana yang proses pembangunannya membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang, dalam artian hasil dari pembangunan tersebut belum bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu yang singkat sehingga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

#### Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa BM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,141 < 1,67109$ ) dan nilai signifikan ( $0,258 > 0,05$ ). Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Nopiani dkk (2016), yang menyatakan BM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Suputra (2017), yang menyatakan bahwa BM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan karena hasil pembangunan dari alokasi belanja modal belum bisa dinikmati manfaatnya dalam kurun waktu yang singkat ataupun pembangunan infrastruktur tersebut masih dalam tahap berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut. Dengan demikian hipotesis kelima belanja modal berpengaruh positif terhadap pengalokasian pertumbuhan ekonomi ditolak.

#### Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan ekonomi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa BM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,126 < 1,67109$ ) dan nilai signifikan ( $0,265 > 0,05$ ). Hasil analisis ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kristina (2017), yang menyatakan IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sejalan dengan Muqorrobin dan Ady (2017), menyimpulkan indeks pembangunan manusia negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia masih cukup tinggi sehingga daerah dengan sumber daya yang terbatas mengalami kesulitan untuk meningkatkan faktor-faktor pendukung pertumbuhan seperti pendidikan hal ini karena pendidikan sebagai modal terpenting masyarakat guna meningkatkan produktifitasnya sebagai tenaga kerja sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk kesehatan serta standar hidup layak Sebagaimana diketahui, bahwa kebutuhan dasar manusia ialah kesehatan dan daya beli, jika indikator kesehatan dan daya beli suatu negara rendah, maka masyarakat tidak bisa menghasilkan produktifitas bagi negaranya. Dengan demikian hipotesis keenam IPM memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Indeks Pembangunan Manusia Tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan analisis yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

Pemerintah daerah khususnya provinsi di Indonesia supaya lebih mengoptimalkan pengelolaan baik SDA maupun SDM yang dimiliki sehingga pemerintah daerah dapat menekan tingkat ketergantungan terhadap pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk melakukan perencanaan belanja sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dimana IPM, BM dan dana perimbangan seperti DAU, DAK yang tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil uji *Adjusted R<sup>2</sup>* dalam penelitian ini bernilai sebesar 70,1% maka terdapat 29,9% variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain seperti inflasi ataupun variabel lain yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N.W.R. dan I.D.G Dharma Suputra. 2017. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi*. E-Jurnal akuntansi Universitas Udayahyana vol.18.3
- Dwirandra, A.A.N.B dan Candra.2014.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.3 ISSN 2302-8556.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kristina, Asya Y.D. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Mnausia, dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol.1 jilid 2. Hal 176-188.

Nopiani, Ni Made, Wayan Cipta, & Fridayana Yudiaatmaja. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4.

Oktafia, Ardianin. Aris Solisty dan Zainal Arifin. 2018. *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal ilmu ekonomi vol 2 jilid 1 hal. 53-62.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

Rakhmawati, Rusmarinda. 2016. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rahmah AR dan Basri Zein. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol.1 No.1 Hal 213-220.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Saleh, 2017. *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja daerah sebagai variabel moderating pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Todaro. (2011). *Pembangunan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.